

**Evaluasi Penerapan
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Dalam Pembangunan di Kabupaten Boyolali**
Wahyu Dwi Nugroho^{1,*}, Endang Larasati², Hartuti Purnaweni²

¹ The Joint of Environmental Science Magister, Diponegoro University, Semarang, Indonesia

² Department of Environmental Science Magister, Diponegoro University, Semarang, Indonesia
* why2dn@yahoo.com

ABSTRACT

It is impossible for us to built something for increasing prosperity of social life without taking notice the using natural sources. But the exploitation of natural sources will result falling down the quality of environment, if it doesn't value the ability and capacity of the environment quality it self. There are many factors caused environmental quality degradation and damage can be identified by observing area. Particularly in the autonomy area, where the region government has full competence to manage the develop region it self. The sustainable development principle application which consist of justice, democracy and sustainability will be one way for achieving the prosperity past generation. Those one is mandated in the definition of sustainable development. The region of Boyolali has a great responsibility to realize the idea and main agenda of sustainable development for the prosperity past generation.

This observation is purpose to evaluate sustainable development principle application in Boyolali region, especially about the result of application sustainable development principle which supporting and inhibit factor. This observation method is used for explanation, interview technique with the assistance of guided interview. The sample taking from SKPD with representative ability in the development act of Boyolali region.

The result of this observation shows the planning of sustainable development principle application has being in Boyolali region, but has not optimal yet on concretely. It caused by any dominant inhibit factor, such as: fund (15%), less handling integrated (31%), and the value of three development aspects has not same (23%). But on the other hand, there are any supporting factors such as human resources (100%) and data (100%). Top government management commitment must be attention as the based condition of sustainable development principle application successfully.

There some point need to strengthen, such as top government management commitment, human resource management and more professional data, special priority of funding, more integrated handling, and same value of three development aspects (economic, social culture and environment).

Keywords : sustainable development, supporting factor, inhibit factor

1. PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan. Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini dimana Pemerintah Kota dan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan merupakan satu-satunya cara demi tercapainya kesejahteraan lintas generasi. Hal itu diamanatkan dalam definisi pembangunan berkelanjutan.

Secara administratif Kabupaten Boyolali terbagi menjadi 19 wilayah kecamatan yang terdiri dari 267 kelurahan yang mencakup 1.425 Rukun Warga (RW) dan 6.498 Rukun Tetangga (RT) serta 123.360 Kepala Keluarga (KK) dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Luas wilayah Kabupaten Boyolali 101.510,1955 km². Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2009 mencapai 951.717 jiwa dengan nilai pertumbuhan 0,30 % per tahun. Angka kemiskinan mencapai 24,18 % pada tahun 2008.

Kabupaten Boyolali mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan yaitu kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Satu yang dianggap akan membuahkan hasil adalah dengan cara mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Selama ini yang terjadi masih ada ketimpangan dalam pemberian bobot tiga aspek utama dalam pembangunan tersebut, dan evaluasi yang belum cukup efektif memberikan *feedback*.

Pada dasarnya proses sinkronisasi, integrasi dan pemberian bobot yang sama pada tiga aspek pembangunan tersebut hanya dapat dilakukan jika melibatkan tiga aspek tersebut dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam dokumen RPJMD 2005-2010 prioritas lingkungan hidup menjadi prioritas ke 9 (sembilan) dari 12 (dua belas) prioritas pembangunan yang ada. Pada akhir tahun 2009 urusan lingkungan hidup menyumbangkan capaian keberhasilan sebesar 86,87% (akhir tahun 2008 sebesar 42,42%). Berdasarkan capaian tersebut belum terlihat capaian

urusan lingkungan hidup yang memuaskan. Jika dilihat dari nilai capaian akhir 2008 dan akhir 2009 terjadi peningkatan yang sangat drastis sebesar 44,45%. Ini menunjukkan bahwa distribusi target RPJMD belum dilakukan secara merata setiap tahunnya dari 5 tahun yang direncanakan. Salah satu kendala dalam proses evaluasi RPJMD adalah kurangnya tingkat pemahaman dari SKPD untuk melaksanakan program dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini tentunya tidak menjamin bahwa integrasi seluruh urusan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sudah dilakukan secara kontinu dan menyeluruh. Apakah pembobotan ketiga aspek pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup) sudah dilakukan secara proporsional dan terintegrasi sehingga mengarah pada konsep pembangunan berkelanjutan. Belum lagi keterbatasan SDM, anggaran dan dokumentasi data antar waktu yang masih sangat dirasakan ikut menghambat proses pembangunan di Kabupaten Boyolali.

1.2 Pendekatan Masalah

Pengelolaan lingkungan yang meliputi rencana pelestarian dan penanganan isu atau masalah lingkungan di Kabupaten Boyolali sekarang ini masih belum cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu diantaranya :

- Pertumbuhan ekonomi masih menjadi parameter utama keberhasilan pembangunan (beban angka kemiskinan 24,18 %)
- Belum adanya integrasi, sinkronisasi dan pemberian bobot yang sama pada tiga aspek pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup)
- Penanganan masalah-masalah lingkungan belum dilakukan secara terintegrasi dan hanya menjadi urusan beberapa SKPD
- Belum adanya internalisasi pemahaman dan konsep yang jelas tentang *Sustainable Development* dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali

Dari permasalahan muncul beberapa pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali ?
3. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali ?

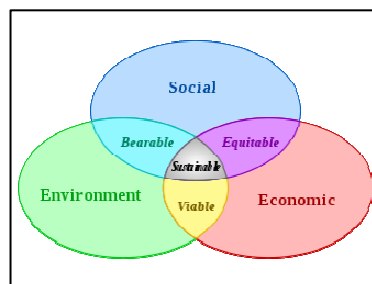
1.3 Tinjauan Pustaka

Pembangunan yang berkelanjutan, diartikan sebagai pembangunan yang tidak ada henti-hentinya dengan tingkat hidup generasi yang akan datang tidak boleh lebih buruk atau justru harus lebih baik daripada tingkat hidup generasi saat ini. Keberlanjutan pembangunan ini dapat didefinisikan dalam arti lunak yaitu bahwa generasi yang akan datang harus berada dalam posisi yang tidak lebih buruk daripada generasi sekarang. (Suparmoko dkk, 2007)

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada 2 konsep kunci utama yaitu kebutuhan (*needs*) yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan serta keterbatasan (*limitation*) dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. (Hadi, 2001)

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. (<http://www.rudycr.com>)

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup aspek kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Skema pembangunan berkelanjutan terletak pada titik temu tiga pilar tersebut, (<http://id.wikipedia.org>)



Gambar Skema Pembangunan Berkelanjutan

Sumber : <http://geo.ugm.ac.id>

Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proporsional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan. (<http://geo.ugm.ac.id>)

Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan : (Keraf, 2002)

- a. Prinsip demokrasi, menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat.
- b. Prinsip keadilan, menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan serta ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.
- c. Prinsip keberlanjutan, mengharuskan adanya rancangan agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang yang pada akhirnya akan menunjang prinsip keadilan antar generasi.

Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : (Fauzi, 2004)

1. Dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
2. Dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat seperti berikut: (Hadi, 2001: 6)

1. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi
2. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat
4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis
5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual

Kerangka kerja kebijakan publik atau pembangunan akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut : (Subarsono, 2005)

1. Tujuan yang akan dicapai
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan
3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. (Sutamihardja, 2004)

Metode kualitatif terdiri dari tiga cara pengumpulan data : (1) wawancara mendalam, wawancara dengan format pertanyaan terbuka; (2) observasi langsung; dan (3) pemanfaatan dokumen tertulis, termasuk sumber-sumber tertulis dari hasil wawancara terbuka pada kuesioner, buku harian, dan catatan program. Data wawancara terbuka terdiri dari kutipan langsung dari orang tentang pengalaman, opini, perasaan dan pengetahuannya. Data hasil observasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai kegiatan suatu program, perilaku para peserta, aksi para staf dan interaksi antarsesama secara luas yang dapat menjadi bagian dari pengalaman program. Dokumen diambil dari kutipan-kutipan yang dianalisis, kutipan-kutipan, atau seluruh kalimat dari hasil rekaman, surat menyurat, laporan resmi dan survey yang menggunakan pertanyaan terbuka. (Patton, 2006)

2. METODOLOGI

2.1 Lokasi

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Bahan

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan teknik interview atau wawancara langsung menggunakan *guided interview* dengan berbagai unsur stakeholder yang terkait. Data tersebut meliputi data hasil interview.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh berdasarkan kajian laporan, data dari instansi terkait. Data tersebut meliputi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), BDA (Boyolali Dalam Angka), Evaluasi RPJMD dan Evaluasi Semesteran.

2.3 Sampel

Populasi dan sampel diambil dari SKPD yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Boyolali berdasarkan SK Bupati Boyolali nomor 050/135 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis

Evaluasi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2009. Sampel SKPD yang diambil adalah SKPD yang berasal dari urusan-urusan yang representasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali (di bawah koordinasi Asisten Bidang Pembangunan Kabupaten Boyolali) yang meliputi 12 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dengan total 13 SKPD. SKPD tersebut antara lain Kantor Ketahanan Pangan (KKP), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DPUPPK), Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM), Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2.4 Metode

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe eksplanatory, teknik interview dengan bantuan *guided interview* dilakukan dengan mempersiapkan panduan wawancara terlebih dahulu sebagai bekal wawancara lapangan. Perumusan masalah dengan metode analisis klasifikasi yaitu klasifikasi masalah dalam katagori yang berbeda dengan tujuan memudahkan analisis. Analisa data dan masalah dengan Diagram Pie yang menggunakan metode Tinjauan Pustaka (Literature Review). Dari hasil analisa data dan masalah yang telah dikuantifikasikan tersebut akan diperoleh gambaran tentang kondisi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian Evaluasi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Boyolali ini akan menggambarkan tentang telaah penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali berikut faktor penunjang dan faktor penghambat yang berpengaruh.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian tentang Evaluasi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Boyolali ini adalah sebagai berikut :

3.1 Keberhasilan Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

1. Pemahaman aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali tentang arti pembangunan berkelanjutan masuk dalam kriteria sangat tinggi (85%).
2. Kondisi tingkat penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pemerintah Kabupaten Boyolali termasuk dalam kriteria sangat tinggi (100%) dengan berbagai usaha yang ada.
3. Kesadaran aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap arti penting pembangunan berkelanjutan termasuk sangat tinggi (92,3%) meskipun tidak terlepas dari keberhasilan dan ketidak berhasilan mereka dalam pelaksanaannya.
4. Tingkat kesadaran aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan termasuk dalam kriteria sangat tinggi (100%).
5. Komitmen aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan termasuk dalam kriteria sangat tinggi (100%).
6. Tingkat keberadaan bidang atau bagian yang berperan dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada institusi Pemerintah Kabupaten Boyolali masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%).
7. Komitmen institusi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah disertai dengan langkah nyata melalui keberadaan program/kegiatan/dokumen yang masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%).
8. Distribusi proporsi program/kegiatan/dokumen yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semester 2 tahun 2010 masuk dalam kriteria sangat tinggi (90%). Persepsi ini semakin menguatkan bahwa institusi Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai langkah nyata dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan meskipun tidak dalam setiap semester.
9. Keberhasilan aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil penelitian tersebut masuk dalam kriteria sedang (54%), hal ini tentunya disebabkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemui.

3.2 Faktor Pendukung Pembangunan Berkelanjutan

1. Kesadaran aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap isu lingkungan hidup masuk dalam kriteria sangat tinggi (92%).
2. Institusi Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah mengakomodir penanganan masalah-masalah yang timbul sebagai dampak dari pembangunan agar proses pembangunan dapat terus berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat, ditunjukkan dari hasil penelitian adanya program/kegiatan dengan input (adanya masalah yang terjadi) tentang pengelolaan urusan lingkungan hidup yang masuk katagori sangat tinggi (85%).
3. Pemerintah Kabupaten Boyolali tidak hanya mengakomodir penanganan masalah sebagai akibat adanya pembangunan, namun juga berusaha mengelola potensi lingkungan hidup yang dapat dioptimalkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil penelitian adanya program/kegiatan dengan output (adanya potensi yang dapat digali) tentang pengelolaan urusan lingkungan hidup masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%).
4. Keterlibatan elemen lain selain Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan lingkungan hidup masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%). Dengan adanya keterlibatan elemen lain selain Pemerintah Kabupaten Boyolali

dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali, sebenarnya menunjukkan adanya iklim yang kondusif dan dinamis karena melibatkan *stakeholder* elemen lain di Boyolali dalam pengelolaan lingkungan hidup.

5. Kesadaran dari aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk merekrut SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan dalam keberhasilan penerapan pembangunan berkelanjutan sangat tinggi (100%).
6. Hasil penelitian tentang pemahaman aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap karakteristik SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%). Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan idealnya ditindak lanjuti dengan rekrutmen SDM dengan karakteristik tertentu yaitu SDM yang memiliki komitmen, kompetensi dibidangnya, power, bertanggung jawab dan mempunyai etos kerja tinggi.
7. Tidak adanya penyebab tidak membutuhkan SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan dalam Pemerintah Kabupaten Boyolali masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%). Hal ini semakin menguatkan bahwa aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali menyadari sangat membutuhkan SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan.
8. Peranan SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali masuk dalam kriteria sangat tinggi (100%). Peranan SDM yang memahami konsep pembangunan berkelanjutan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan yaitu memastikan konsep pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan semestinya.
9. Besaran alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup masuk dalam kriteria rendah (23%). Hal ini menggambarkan bahwa meskipun komitmen aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap pembangunan berkelanjutan cukup bagus, namun ada keterbatasan dari sisi anggaran sehingga anggaran pengelolaan lingkungan hidup belum dianggap sebagai prioritas utama.
10. Kecukupan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali masih sangat rendah (15%).
11. Aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali sangat menyadari dan mengetahui karakteristik data yang update sangat dibutuhkan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan (100%).
12. Aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah memahami metode-metode perencanaan yang ada (100%) dan mencoba mengimplementasikannya dalam pembangunan berkelanjutan dengan berbagai variasi hasil akhir yang diperoleh.
13. Dalam Pemerintah Kabupaten Boyolali ada beberapa faktor yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (100%) jika dikelola dengan optimal; diantaranya adalah data dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor tersebut masih perlu digali lebih jauh untuk menunjang keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

3.3 Faktor Penghambat Pembangunan Berkelanjutan

1. Persepsi pertumbuhan ekonomi masih menjadi parameter utama keberhasilan pembangunan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Boyolali (100%).
2. Belum ada integrasi, sinkronisasi dan pemberian bobot yang sama pada tiga aspek pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup) dalam pembangunan Kabupaten Boyolali (23%).
3. Faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan dari tiga aspek (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup) dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali (100%).
4. Penanganan masalah lingkungan di Kabupaten Boyolali sudah dilakukan secara terintegrasi (69%) meskipun belum optimal.
5. Sudah ada internalisasi pemahaman dan konsep tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali meskipun masih sedang (54%) sehingga capaiannya belum optimal.
6. Adanya faktor penghambat dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali (100%). Faktor penghambat tersebut didominasi oleh faktor keterbatasan anggaran (pendanaan), kurang terintegrasinya penanganan masalah sebagai dampak pembangunan, serta pemberian bobot yang belum sama pada tiga aspek pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup).
7. Struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang ada sekarang cukup efektif untuk mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, meskipun capaian keberhasilannya belum optimal yang ditunjukkan dengan angka capaian sebesar 69%.

4. KESIMPULAN

1. Syarat awal berhasilnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah adanya komitmen yang kuat dari Manajemen Puncak Pemerintahan Kabupaten Boyolali yang di tindak lanjuti dengan komitmen secara kelembagaan sesuai jenjang kewenangan yang diterjemahkan ke dalam setiap kebijakan yang diambil sehingga komitmen tersebut bersifat menyeluruh.
2. Beberapa faktor pendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Boyolali antara lain SDM dan data harus dikelola secara profesional sehingga dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.
 - a. Rekrutmen dan penempatan SDM dilakukan dengan orientasi ahli di bidangnya, disamping itu dilakukan peningkatan kualitas SDM secara kontinu sesuai dengan kebutuhan.

- b. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Boyolali harus menyusun sistem penyediaan data yang update dan akurat.
3. Beberapa faktor penghambat pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Boyolali antara lain dana, penanganan yang kurang terintegrasi, serta bobot yang belum sama antara tiga aspek pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup) harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - a. Diperlukan komitmen pendanaan yang lebih serius oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali guna menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Pentingnya penanganan masalah yang timbul dari dampak pembangunan secara terintegrasi oleh stakeholders yang berkepentingan, sehingga lebih efektif dan cepat terselesaikan.
 - c. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan internalisasi pemahaman dan konsep tentang Pembangunan Berkelanjutan sehingga menjamin adanya pemberian bobot yang sama antara aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
4. Seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, baik pemerintah, masyarakat, LSM, sektor swasta harus bahu membahu bekerjasama sesuai peranan masing-masing untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Fauzi, A, 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hadi, Sudharto P, 2001, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Keraf, A. Sonny, 2002, Etika Lingkungan, Kompas, Jakarta
- Patton, Michael Quinn, 2006, Metode Evaluasi Kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suparmoko. M & Suparmoko. R. Maria, Ekonomika Lingkungan, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Sutamihardja, 2004, Perubahan Lingkungan Global, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, IPB
- Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- http://rudycr.com/PPS702-ipb/08234/sri_purwaningsih.pdf
- http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/09145/askar_jaya.pdf
- <http://geo.ugm.ac.id/archives/125>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan